

Katalog : 4101041.73

Analisis Indikator Makro
SOSIAL
Provinsi Sulawesi Selatan
Semester 1-2021

<https://sulsel.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Analisis Indikator Makro

SOSIAL

Provinsi Sulawesi Selatan

Semester 1-2021



ANALISIS MAKRO SOSIAL

PROVINSI SULAWESI SELATAN SEMESTER 1-2021

ISBN : 978-623-6203-20-0
Katalog BPS : 4101041.73
Nomor Publikasi : 73000.2142
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : xii + 28 halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik – Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar Kulit :
Badan Pusat Statistik – Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber Ilustrasi :
www.freepik.com

Diterbitkan dan Dicitak oleh :
© Badan Pusat Statistik – Provinsi Sulawesi Selatan

***Dilarang Mengumumkan, Mendistribusikan,
Mengomunikasikan, dan/atau Menggandakan Sebagian
atau Seluruh isi Buku ini Untuk Tujuan Komersial Tanpa Izin
Tertulis dari Badan Pusat Statistik.***

TIM PENYUSUN

Pengarah

Yos Rusdiansyah

Penanggungjawab

Suri Handayani

Editor

Thini Isywari Hadi

Penulis

Daswita Tri Ariani

Desain Sampul dan Tata Letak

Muhammad Ilham Mubarak

Kata Pengantar

Publikasi Analisis Indikator Makro Sosial Sulawesi Selatan Semester 1-2021 merupakan publikasi baru yang dibuat oleh BPS Provinsi Sulawesi Selatan dan secara rutin akan terbit setiap semester. Publikasi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen data yang ingin melihat perkembangan data sosial di Sulawesi Selatan secara berkala setiap semesternya. Diharapkan publikasi ini semakin memudahkan konsumen data dalam memahami data-data indikator makro sosial yang secara rutin dirilis oleh BPS Provinsi Sulawesi Selatan.

Publikasi Analisis Indikator Makro Sosial Sulawesi Selatan Semester 1-2021 berisi ulasan/analisis singkat tentang data-data indikator sosial Sulawesi Selatan antara lain perkembangan kependudukan, tenaga kerja, kemiskinan serta pembangunan manusia. Untuk memudahkan pemahaman dan pemanfaatan data, dalam publikasi ini juga disertakan penjelasan teknis dari setiap jenis statistik yang ditampilkan.

Semoga publikasi ini bias memberikan informasi barhagra bagi pengguna data BPS, baik aparat pemerintah maupun publik, dan diharapkan publikasi ini bisa menjadi sumber informasi yang berguna untuk berbagai tujuan.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya sehingga publikasi ini bisa disajikan. Kritik dan saran akan sangat berharga untu penyempurnaan publikasi edisi berikutnya.

Makassar, Juli 2021

**Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Selatan**



Suntono

PENJELASAN TEKNIS

Penduduk

- Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
- Sumber data penduduk yang tersedia secara periodik hanyalah Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) untuk digunakan dalam proyeksi penduduk.
- Proyeksi penduduk merupakan penghitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen laju pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi).

Kemiskinan

- Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
- Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
- Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM)

$$GK=GKM+GKNM$$

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan.

- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori perkapita. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Ke 52 jenis komoditi ini merupakan komoditi-komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh orang miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi ini sekitar 70 persen dari total pengeluaran orang miskin.
- Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.
- Ukuran Kemiskinan
 1. *Head Count Index* (HCI-P0), yaitu persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).
 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
 3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) adalah ukuran yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

- Koefisien gini (Gini Rasio) didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

$$GR = 1 - \sum_{i=0}^n f_{pi} X (F_{Ci} + F_{Ci-1})$$

GR = Koefisien gini

F_{pi} = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{ci} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

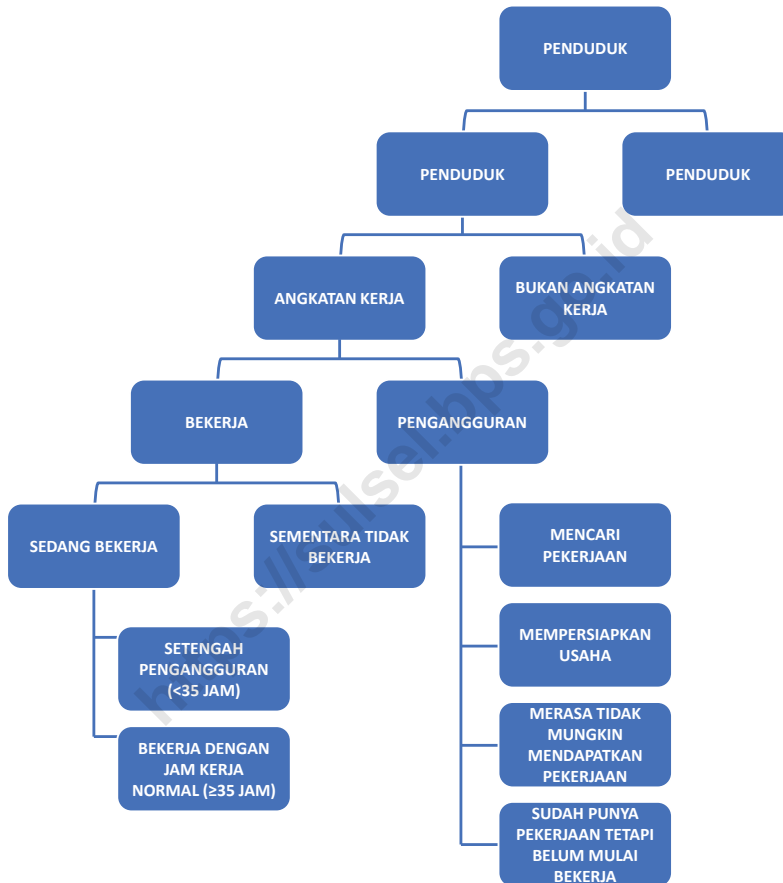
F_{ci-1} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

- Gini Rasio digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.
- Gini Rasio berkisar antara 0 sampai 1. Apabila Gini Rasio bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Ketenagakerjaan

- Konsep yang digunakan dalam data ketenagakerjaan adalah *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization* (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya yaitu Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.
- Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun atau lebih.
- Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.
- Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
- Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar/pekerja keluarga yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
- Definisi baku dari penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, bersedia untuk bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Definisi ini digunakan pada pelaksanaan Sakernas 1986 sampai dengan 2000, sedangkan sejak tahun 2001 definisi pengangguran mengalami penyesuaian/perluasan menjadi sebagai berikut:
- Penganggur adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja), dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan sebagai bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (*jobless*). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut sebagai penganggur terbuka (*open unemployment*).

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam perekonomian.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
- Diagram Ketenagakerjaan



Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan rata-rata dari indeks *longevity*, indeks pendidikan dan indeks tingkat hidup layak. Terdapat 4 indikator (dari 3 dimensi) pembentuk angka IPM:
 1. Dimensi Kesehatan diukur dengan indikator: Umur Harapan Hidup,
 2. Dimensi Pendidikan diukur dengan indikator: Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah,
 3. Dimensi Hidup Layak diukur dengan indikator: Pengeluaran Perkapita Disesuaikan.

- Status pembangunan manusia
 - Rendah : < 60
 - Sedang : $60 \leq IPM < 70$
 - Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
 - Sangat tinggi : ≥ 80
- Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$Pertumbuhan\ IPM = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

<https://sulsel.bps.go.id>

Daftar Isi

v	KATA PENGANTAR
vii	PENJELASAN TEKNIS
xiii	DAFTAR ISI
1	BAB I PENDUDUK
7	BAB II KEMISKINAN
15	BAB III KETENAGAKERJAAN
21	BAB IV INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

BABI PENDUDUK

<https://sulsel.bps.go.id>



PENDUDUK

Hasil proyeksi penduduk proyeksi penduduk dengan dasar hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015 (Supas 2015) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Sulawesi Selatan hingga Juni 2021 sebanyak 8.956,18 ribu orang. Penduduk laki-laki sebanyak 4.382,65 ribu orang, sedangkan penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki yaitu sebanyak 4.573,53 ribu orang. Rasio jenis kelamin penduduk Sulawesi Selatan sebesar 95,83, artinya di antara 100 perempuan terdapat 96 laki-laki. Besarnya jumlah penduduk perempuan dibanding penduduk laki-laki terjadi pada kelompok umur 20 tahun hingga 75+, sedangkan pada kelompok umur 0 hingga 24 tahun, penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan.

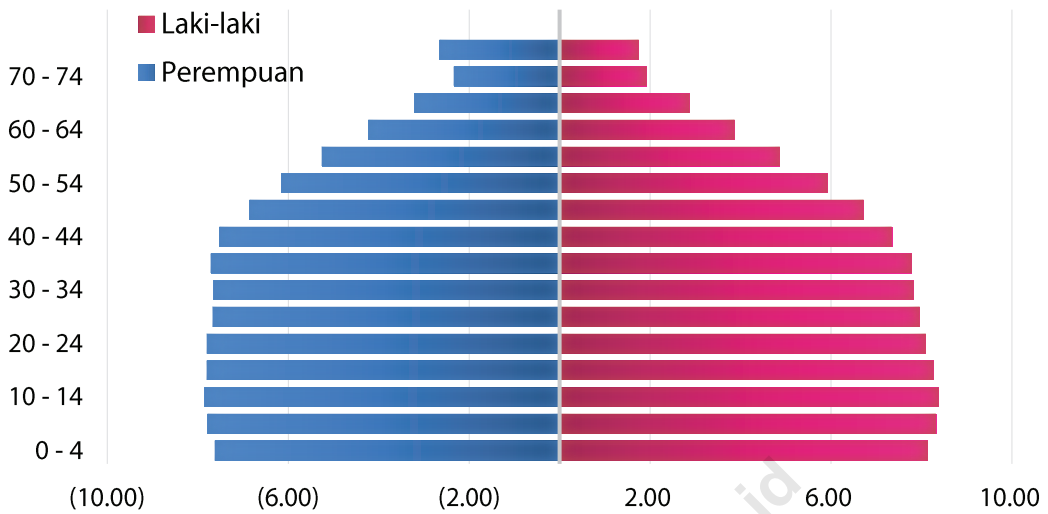
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Sulawesi Selatan Menurut Kelompok Umur dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2021

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan	Total	
0 - 4	356.395	348.327	704.722	102,32
5-9	364.800	355.764	720.564	102,54
10-14	366.832	358.933	725.765	102,20
15 - 19	362.165	356.513	718.678	101,59
20 - 24	354.857	356.403	711.260	99,57
25 - 29	348.523	350.441	698.964	99,45
30 - 34	343.208	349.536	692.744	98,19
35 - 39	341.123	352.345	693.468	96,82
40 - 44	322.254	343.494	665.748	93,82
45 - 49	294.837	313.359	608.196	94,09
50 - 54	259.149	280.895	540.044	92,26
55 - 59	213.105	240.214	453.319	88,71
60 - 64	169.742	193.092	362.834	87,91
65 - 69	125.500	146.685	272.185	85,56
70 - 74	83.884	106.451	190.335	78,80
75+	76.272	121.083	197.355	62,99
Jumlah	4.382.646	4.573.535	8.956.181	95,83

Sumber : Proyeksi SUPAS 2015-2025

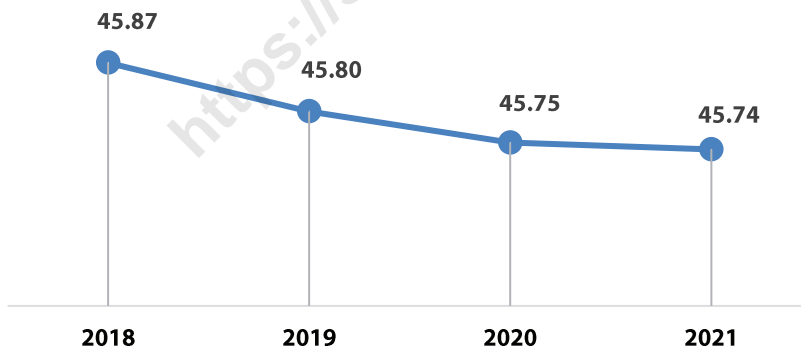
Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kabupaten Luwu Timur sebesar 106,31 diikuti oleh Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara dengan rasio jenis kelamin masing-masing sebesar 103,06 dan 101,23. Sedangkan Kabupaten/kota yang memiliki rasio jenis kelamin terendah adalah Kabupaten Soppeng (89,17), Kabupaten Bulukumba (89,92) dan Kabupaten Bone (91,57).

Gambar 1.1 Piramida Penduduk Sulawesi Selatan, 2021



Piramida penduduk Sulawesi Selatan tahun 2021 termasuk tipe expansive dengan sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Gambar di bawah menunjukkan piramida yang masih lebar di bagian bawah dan cembung di bagian tengah, sedangkan pada bagian atas meruncing.

Gambar 1.2 Rasio Ketergantungan Penduduk Sulawesi Selatan, 2017-2020



Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara penduduk usia nonproduktif (penduduk 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun). Hasil proyeksi penduduk menunjukkan rasio ketergantungan penduduk Sulawesi Selatan pada tahun 2021 sebesar 45,74. Angka ini mengandung makna bahwa setiap 100 orang usia produktif menanggung penduduk usia nonproduktif sekitar 46 orang.

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, rasio ketergantungan penduduk Sulawesi Selatan memiliki tren yang menurun. Jika pada tahun 2018 rasio ketergantungan sebesar 45,87 maka pada tahun 2021 kondisinya semakin membaik. Penurunan rasio ketergantungan ini menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan telah memasuki era bonus demografi. Bonus demografi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk peningkatan

perekonomian apabila lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal serta skill tenaga kerja usia produktif ditingkatkan. Kabupaten/kota dengan rasio ketergantungan tertinggi adalah Kabupaten Toraja Utara dengan rasio ketergantungan sebesar 60,86 pada tahun 2020 dan yang terendah adalah Kabupaten Wajo sebesar 39,42.

Pada tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Selatan sebesar 0,76 persen. Bila dilihat dari kabupaten/kota pembentuknya, kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Palopo (1,70 persen), Luwu Timur (1,54 persen) dan Gowa (1,20 persen). Sementara itu, kabupaten/kota yang dengan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Soppeng (0,17 persen), Barru (0,25 persen), dan Bone (0,29 persen).

Berdasarkan proporsinya, pada tahun 2021 penduduk Sulawesi Selatan sebagian besar berdomisili di Kota Makassar, yaitu sebesar 17,36 persen di tahun 2021, diikuti oleh Kabupaten Gowa (8,71 persen) dan Kabupaten Bone (8,46 persen). Sebaliknya, 3 Kabupaten/kota dengan proporsi penduduk terendah yaitu Kabupaten Selayar, Kota Parepare dan Kabupaten Barru dengan proporsi masing-masing sebesar 1,52 persen; 1,64 persen dan 1,95 persen.

Tabel 1.2 Demografi Penduduk Sulawesi Selatan, 2021

Kabupaten/Kota	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	Rasio JK	Rasio Ketergantungan
Selayar	136	0,67	100	92,86	51,32
Bulukumba	421	0,38	328	89,92	43,57
Bantaeng	189	0,45	478	93,56	39,42
Jeneponto	367	0,45	520	93,92	43,31
Takalar	298	0,60	527	92,86	43,05
Gowa	780	1,20	414	97,08	43,91
Sinjai	245	0,43	307	93,94	46,47
Maros	357	0,79	221	95,96	46,16
Pangkep	339	0,73	300	93,73	45,19
Barru	175	0,29	149	92,63	46,68
Bone	757	0,25	166	91,57	46,35
Soppeng	229	0,17	147	89,17	45,39
Wajo	406	0,45	162	91,84	41,82
Sidrap	302	0,67	161	95,81	44,16
Pinrang	381	0,56	194	94,50	47,71
Enrekang	209	0,73	118	101,13	54,50
Luwu	369	0,83	111	96,99	50,56
Tana Toraja	239	0,67	120	103,06	56,23
Luwu Utara	318	0,75	42	101,00	47,29
Luwu Timur	303	1,54	44	106,31	48,55
Toraja Utara	237	0,77	195	101,23	60,86
Makassar	1.555	1,10	7.804	98,25	42,57
Parepare	147	0,90	1.481	96,63	44,25
Palopo	187	1,70	742	95,39	46,85
Sulawesi Selatan	8.956	0,76	192	95,83	45,74

BAB II

KEMISKINAN

<https://sulsel.bps.go.id>

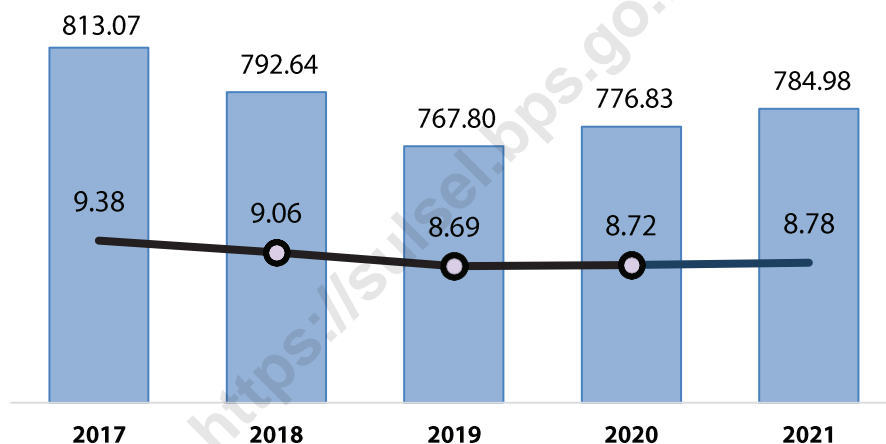


KEMISKINAN

2.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan

Penduduk miskin di Sulawesi Selatan keadaan Maret 2021 berjumlah 784,98 ribu jiwa atau 8,78 persen dari total penduduk. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Apabila dilihat berdasarkan gambar 2.1, penduduk miskin mengalami peningkatan secara persentase yaitu sebesar 0,06 poin. Selain itu juga mengalami peningkatan secara absolut sebesar 8,15 ribu jiwa jika dibandingkan kondisi Maret 2020 yang besarnya 8,72 persen atau 776,83 ribu jiwa.

Gambar 2.1 Jumlah dan persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan, Maret 2017 – Maret 2021



Tabel 2.1 menunjukkan bahwa penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan sebagian besar berada di pedesaan. Pada Maret 2021, penduduk miskin di pedesaan masih mencapai 593,48 ribu jiwa (75,60 persen), sementara di daerah perkotaan hanya 191,50 ribu jiwa (24,40 persen). Dibandingkan dengan keadaan Maret 2020, penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami kenaikan sebesar 17,7 ribu jiwa, sedangkan daerah pedesaan mengalami penurunan sebesar 9,55 ribu jiwa.

Tabel 2.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan Menurut Daerah, Maret 2017 – Maret 2021

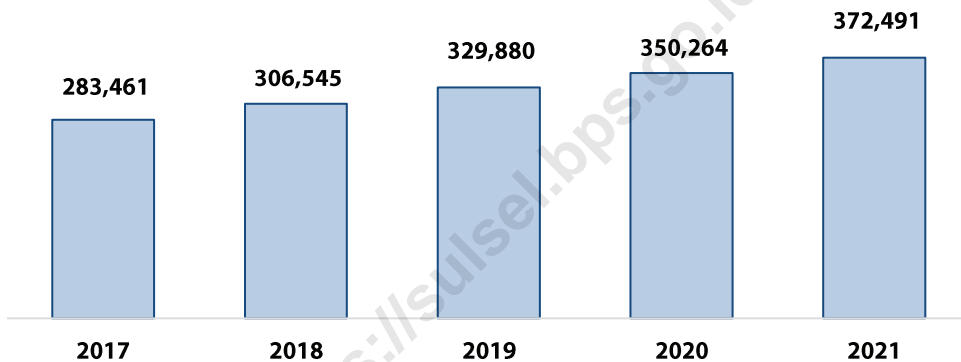
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
Mar-17	153,56	659,51	813,07	4,48	12,59	9,38
Mar-18	167,94	624,70	792,64	4,61	12,24	9,06
Mar-19	170,10	597,69	767,80	4,44	11,95	8,69
Mar-20	173,80	603,03	776,83	4,49	11,97	8,72
Mar-21	191,50	593,48	784,98	4,77	12,05	8,78

Persentase penduduk miskin di pedesaan juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan di perkotaan. Pada Maret 2021 penduduk miskin di pedesaan mencapai 12,05 persen sedangkan di perkotaan hanya sebesar 4,77 persen. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada Maret 2020, terjadi kenaikan persentase baik di perkotaan maupun di pedesaan. Untuk perkotaan, persentase penduduk miskin naik sebesar 0,28 poin sedangkan untuk pedesaan sebesar 0,08 poin.

2.2. Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2017 – Maret 2021

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Gambar 2.2 Perkembangan Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan, Maret 2017 – Maret 2021 (Rupiah)



Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan pada Maret 2021 sebesar Rp 372.491. Apabila dilihat dari perkembangannya, Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan Maret 2020, kenaikan garis kemiskinan di tahun 2021 sebesar 6,35 persen.

Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Berdasarkan proporsinya, terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan).

Pada Maret 2020, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 75,28 persen, hal yang sama terjadi pada Maret 2021 yang memiliki peranan relatif sama namun mengalami sedikit penurunan menjadi 74,97 persen. Peranan GKM terhadap GK untuk daerah perkotaan pada Maret 2020 sebesar 70,85 persen dan pada Maret 2021 mengalami peningkatan menjadi 71,04 persen. Sedangkan untuk daerah pedesaan, pada Maret 2021 sebesar 78,42 persen yang mengalami penurunan 0,47 poin dari Maret 2020 sebesar 78,89 persen.

Tabel 2.2 Garis Kemiskinan Menurut Daerah dan Komoditi di Sulawesi Selatan, Maret 2017 – Maret 2021

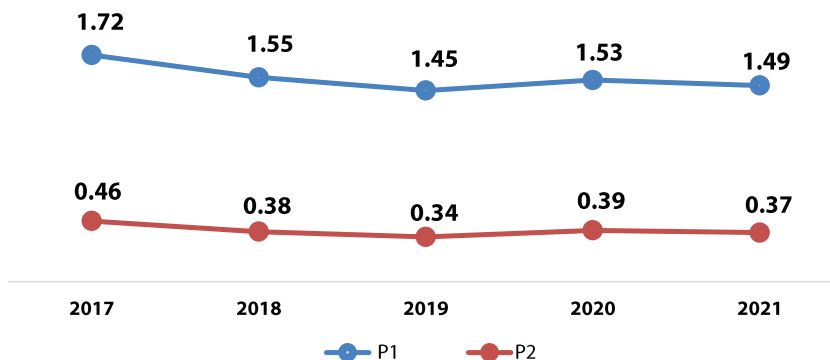
Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
Perkotaan			
Maret 2017	204.192	92.452	296.644
Maret 2018	218.173	96.376	314.549
Maret 2019	238.425	100.572	338.997
Maret 2020	257.455	105.906	363.361
Maret 2021	276.910	112.894	389.804
Perdesaan			
Maret 2017	215.791	58.643	274.434
Maret 2018	236.336	63.581	299.917
Maret 2019	254.134	68.088	322.222
Maret 2020	268.024	71.719	339.743
Maret 2021	281.013	77.317	358.330
Perkotaan+Pedesaan			
Maret 2017	211.452	72.009	283.461
Maret 2018	229.289	77.256	306.545
Maret 2019	247.704	82.176	329.880
Maret 2020	263.690	86.574	350.264
Maret 2021	279.240	93.251	372.491

Sebaliknya, sumbangan GKBM terhadap GK cukup kecil baik itu di daerah perkotaan maupun pedesaan. Pada Maret 2020 untuk daerah perkotaan, sumbangan GKBM terhadap GK sebesar 29,15 persen dan mengalami penurunan pada Maret 2021 sebesar 0,18 poin menjadi 28,96 persen. Sebaliknya di daerah pedesaan, peranannya meningkat dari 21,11 persen pada Maret 2020 menjadi 21,58 persen pada Maret 2021.

2.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan cenderung mengalami penurunan sejak Maret 2017 hingga Maret 2021, meskipun sempat mengalami peningkatan pada tahun 2020. Gambar 2.3 menunjukkan nilai P1 dan P2 mengalami penurunan sebesar 0,23 poin dan 0,09 poin sepanjang periode 2017-2021.

Gambar 2.3 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Sulawesi Selatan, Maret 2017 – Maret 2021



Pada periode Maret 2020-Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) menunjukkan penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan 0,04 poin dari 1,53 pada Maret 2020 menjadi 1,49 pada Maret 2021. Demikian juga untuk Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) yang mengalami penurunan 0,02 poin dari 0,39 pada keadaan Maret 2020 menjadi 0,37 pada keadaan Maret 2021. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin pada periode Maret 2021 juga cenderung menurun jika dibandingkan dengan keadaan pada Maret 2020.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) di daerah pedesaan jauh lebih tinggi daripada daerah perkotaan. Pada Maret 2021, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 0,79 sementara di daerah pedesaan mencapai 2,06. Begitupun dengan nilai Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan yakni sebesar 0,18 sementara daerah pedesaan mencapai 0,53. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendapatan dan ketimpangan di daerah perkotaan lebih baik daripada pedesaan.

Tabel 2.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) Menurut Daerah di Sulawesi Selatan, Maret 2017 – Maret 2021

Indeks/Tahun	Kota	Desa	Kota+Desa
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2017	0,81	2,32	1,72
Maret 2018	0,83	2,07	1,55
Maret 2019	0,63	2,07	1,45
Maret 2020	0,69	2,17	1,53
Maret 2021	0,79	2,06	1,49
Indeks Kearifan Kemiskinan (P2)			
Maret 2017	0,20	0,63	0,46
Maret 2018	0,22	0,50	0,38
Maret 2019	0,13	0,51	0,34
Maret 2020	0,16	0,57	0,39
Maret 2021	0,18	0,53	0,37

Berdasarkan tabel 2.3 terlihat bahwa nilai P1 untuk daerah perkotaan mengalami kenaikan hingga 0,09 poin dari 0,69 pada Maret 2020 menjadi 0,79 pada Maret 2021. Sebaliknya, nilai P1 untuk daerah pedesaan mengalami penurunan hingga 0,11 poin dari 2,17 pada Maret 2020 menjadi 2,06 pada Maret 2021.

Sama halnya dengan P1, nilai P2 untuk daerah perkotaan mengalami kenaikan 0,02 poin dari 0,16 pada Maret 2020 menjadi 0,18 pada Maret 2021. Sedangkan untuk daerah pedesaan, terjadi penurunan sebesar 0,04 poin dari 0,57 pada Maret 2020 menjadi 0,53 pada Maret 2021.

2.4 Perkembangan Gini Ratio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio di Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi dari waktu ke waktu. Gini Ratio cenderung mengalami penurunan sejak Maret 2017 hingga Maret 2021. Pada Maret 2017 tercatat sebesar 0,407, mengalami penurunan pada Maret 2018 menjadi 0,397, kemudian menurun lagi pada Maret 2019 menjadi 0,389. Angka ini tetap stabil pada tahun 2020, kemudian menurun lagi menjadi 0,382 pada tahun 2021.

Tabel 2.4 Gini Ratio Sulawesi Selatan Menurut Daerah, Maret 2017 – Maret 2021

Tahun	Kota	Desa	Kota+Desa
Maret 2017	0,410	0,348	0,407
Maret 2018	0,392	0,361	0,397
Maret 2019	0,394	0,345	0,389
Maret 2020	0,384	0,356	0,389
Maret 2021	0,392	0,338	0,382

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode Maret 2017 hingga Maret 2021, nilai Gini Ratio di perkotaan lebih besar daripada di pedesaan. Walaupun perbedaannya tidak terlalu jauh, hal ini tetap memperlihatkan bahwa ketimpangan yang terjadi di perkotaan lebih besar daripada di pedesaan. Gini Ratio di daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,008 poin. Sebaliknya di daerah pedesaan nilai Gini Ratio malah mengalami penurunan 0,018 poin pada Maret 2021 jika dibandingkan dengan Maret 2020.

2.5 Perkembangan Distribusi Pengeluaran

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang lebih dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Pada Maret 2021, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,38 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang besarnya 17,03 persen.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan tercatat sebesar 16,80 persen yang berarti berada pada kategori ketimpangan sedang. Kondisi ini mengalami penurunan 0,05 poin jika dibandingkan dengan keadaan Maret 2020 yang sebesar 16,85 persen.

Untuk daerah pedesaan, persentase penduduk 40 persen terbawah tercatat sebesar 19,15 persen pada Maret 2021 yang menunjukkan bahwa kelompok tersebut berada pada ketimpangan rendah. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 0,50 poin dari 18,65 pada Maret 2020.

Tabel 2.5 Distribusi Pengeluaran Penduduk Sulawesi Selatan Maret 2018 – Maret 2021

Daerah/Tahun	Penduduk 40 Persen Terbawah	Penduduk 40 Persen Menengah	Penduduk 20 Persen Atas
Perkotaan			
Maret 2018	16,09	39,02	44,89
Maret 2019	16,29	38,55	45,16
Maret 2020	16,85	38,25	44,90
Maret 2021	16,80	37,35	45,85
Perdesaan			
Maret 2018	18,00	39,13	42,87
Maret 2019	18,92	39,39	41,69
Maret 2020	18,65	38,48	42,87
Maret 2021	19,15	39,93	40,92
Perkotaan+Pedesaan			
Maret 2018	16,30	37,72	45,98
Maret 2019	17,02	37,24	45,73
Maret 2020	17,03	37,23	45,74
Maret 2021	17,38	37,61	45,01

BAB III

KETENAGAKERJAAN

<https://sulsel.bps.go.id>



KETENAGAKERJAAN

3.1. Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah angkatan kerja di Sulawesi Selatan pada Februari 2021 sebesar 4.433.714 orang, angka ini terdiri dari 4.176.800 penduduk yang bekerja, atau sekitar 94,21 persen dari total angkatan kerja. Sedangkan 5,79 persen sisanya atau sekitar 256.914 orang adalah pengangguran. Jika dibandingkan dengan keadaan pada Februari 2020, jumlah penduduk usia 15 tahun yang bekerja mengalami peningkatan sebesar 0,94 persen, sedangkan yang menganggur mengalami peningkatan 2,66 persen.

Tabel 3.1 Penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan, Februari 2019- Februari 2021

Kegiatan	2019*	2020	2021
Angkatan Kerja	4.159.838,00	4.388.190,00	4.433.714,00
Bekerja	3.934.557,00	4.137.924,00	4.176.800,00
(%)	94,58	94,30	94,21
Penganggur	225281,00	250266,00	256914,00
(%)	5,42	5,70	5,79
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65,29	65,40	65,36
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,42	5,70	5,79

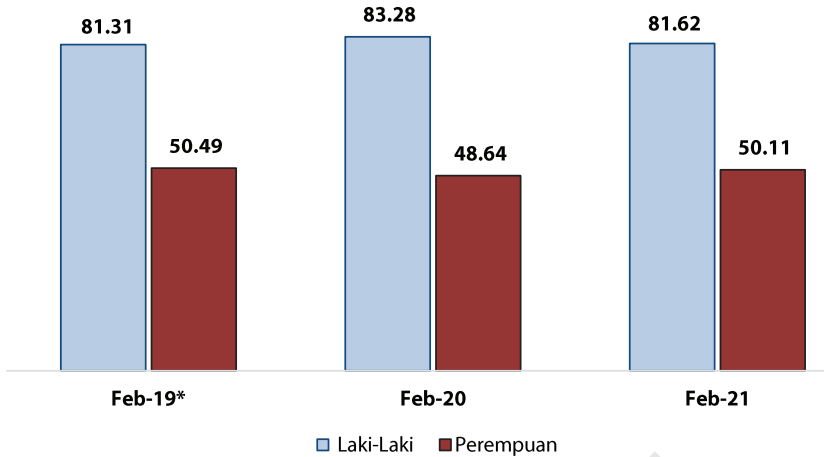
*menggunakan weight SP2020

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Februari 2021 sebesar 65,36 persen. Dibandingkan keadaan pada Februari 2020, TPAK mengalami penurunan sebesar 0,04 poin dari 65,40 persen. Adanya penuruna nilai TPAK menunjukkan bahwa terdapat indikasi adanya potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja yang juga menurun.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) laki-laki jauh lebih besar daripada perempuan. Pada Februari 2021, TPAK laki-laki mencapai 81,62 persen sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 50,11 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, TPAK laki-laki mengalami penurunan 1,66 poin, sedangkan TPAK perempuan mengalami kenaikan 1,47 poin. Besarnya gap antara TPAK laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa masih rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja jika dibandingkan dengan laki-laki.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Pada Februari 2021, TPT Sulawesi Selatan sebesar 5,79 persen, mengalami peningkatan dibandingkan Februari 2020 yang besarnya 5,70 persen.

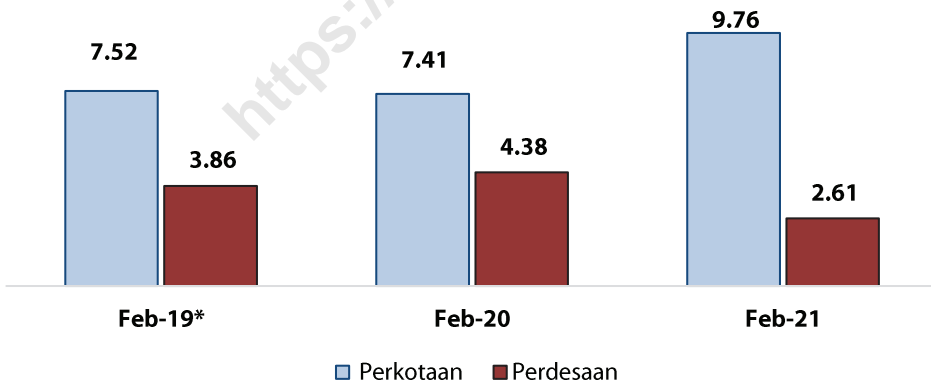
Gambar 3.1 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin, Februari 2019 – Februari 2021



*menggunakan weight SP2020

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan. Pada Februari 2021, TPT perkotaan mencapai 9,76 persen dan TPT pedesaan hanya sebesar 2,61 persen. TPT perkotaan nilainya cenderung semakin meningkat setiap tahunnya, sedangkan TPT Pedesaan pada umumnya mengalami penurunan.

Gambar 3.2 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan Menurut Daerah Tempat Tinggal, Februari 2019 – Februari 2021

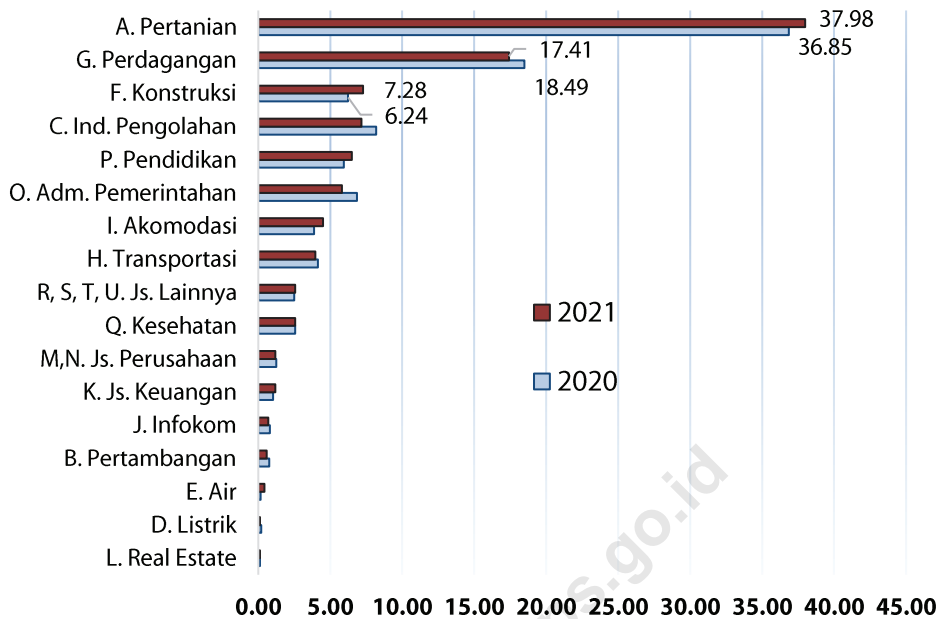


*menggunakan weight SP2020

3.2. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Jumlah penduduk pada setiap kategori lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Februari 2021 didominasi oleh tiga lapangan pekerjaan utama, yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 37,98 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,41 persen serta Konstruksi sebesar 7,28 persen.

Gambar 3.3 Persentase Penduduk yang Bekerja di Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2020 – Februari 2021



Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat 8 lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase jumlah penduduk yang bekerja, dengan peningkatan terbesar terjadi pada lapangan pekerjaan Pertanian yang meningkat sebesar 1,13 poin; Konstruksi yang meningkat 1,04 poin serta lapangan pekerjaan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 0,61 poin. Sementara lapangan pekerjaan yang memiliki penurunan utamanya terjadi pada Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang mengalami penurunan sebesar 1,08 poin; Administrasi Pemerintah sebesar 1,06 poin; dan Industri Pengolahan sebesar 1,02 poin.

3.3. Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Secara sederhana, kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kaategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan/pegawai, sisanya termasuk pekerja informal. Berdasarkan identifikasi ini, pada Februari 2021 sebanyak 1,57 juta orang (37,71 persen) bekerja pada kegiatan formal dan 2,60 juta orang (62,29 persen) bekerja kegiatan informal.

Dalam setahun terakhir (Februari 2020-Februari 2021), peningkatan persentase penduduk bekerja tertinggi pada status pekerja keluarga/tak dibayar (2,99 poin). Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada status berusaha sendiri sebesar 4,46 poin.

Tabel 3.2 Penduduk usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Februari 2019-Februari 2021 (ribu orang)

Status Pekerjaan Utama	2019*	2020	2021
Berusaha Sendiri	795,46	923,61	746,14
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	821,81	807,63	899,97
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	132,10	187,99	196,17
Buruh/ karyawan/pegawai	1.341,95	1.409,30	1.379,07
Pekerja bebas di pertanian	77,44	71,93	72,28
Pekerja bebas di nonpertanian	101,29	113,82	128,81
Pekerja keluarga/tak dibayar	664,51	623,64	754,37
Formal dan Informal			
Formal	1.474,05	1.597,29	1.575,24
Informal	2.460,50	2.540,63	2.601,56
Jumlah	3.934,56	4.137,92	4.176,80

*menggunakan weight SP2020

Komponen pekerja informal terdiri dari penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Dalam setahun terakhir (Februari 2020-Februari 2021) jumlah pekerja informal meningkat sebanyak 60,93 ribu orang

3.4. Penduduk Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2021 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SMP ke bawah sebanyak 2.230,13 ribu orang (53,39 persen). Sedangkan pekerja berpendidikan menengah (SMA sederajat) sebanyak 1.177,74 ribu orang (28,20 persen). Penduduk berpendidikan tinggi hanya sebanyak 768,92 ribu orang (18,41 persen) terdiri dari 118,21 orang berpendidikan diploma I/II/III dan 650,72 ribu orang berpendidikan universitas.

Tabel 3.3 Penduduk usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan, Februari 2019-Februari 2021 (ribu orang)

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2019*	2020	2021
1. SD ke bawah	1.644,79	1.673,90	1.596,91
2. Sekolah Menengah Pertama	602,48	612,30	633,22
3. Sekolah Menengah Atas	686,17	763,21	832,32
4. Sekolah Menengah Kejuruan	309,48	356,96	345,42
5. Diploma I/II/III	110,17	121,98	118,21
6. Universitas	581,47	609,57	650,72
Jumlah	3.934,56	4.137,92	4.176,80

*menggunakan weight SP2020

Dibandingkan keadaan tahun sebelumnya (Februari 2020-Februari 2021), persentase penduduk bekerja yang meningkat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah penduduk yang SMA (1,48 poin), Universitas (0,85 poin), dan SMP (0,36 poin). Sementara penurunan persentase terdapat pada penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah (-2,22 poin), SMK (-0,36 poin) dan Diploma I/II/III (-0,12 poin).

BAB IV INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

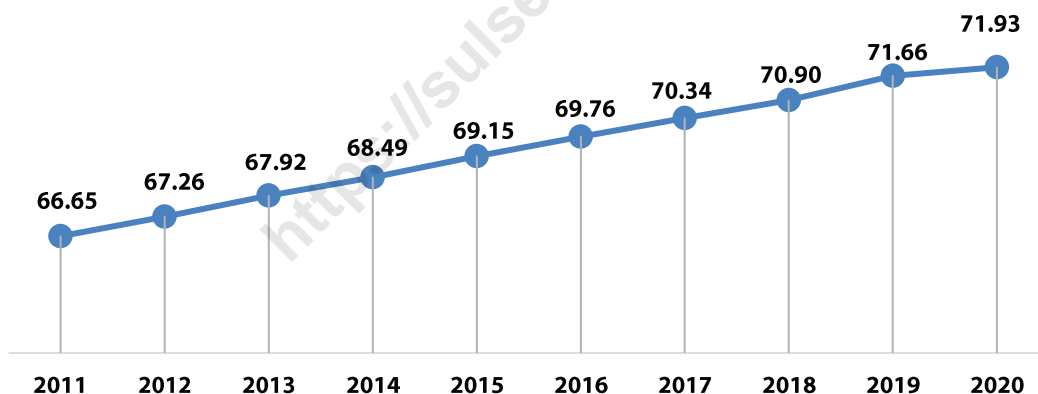


INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

4.1. Perkembangan IPM

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan melalui perolehan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan hasil pembangunan lainnya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Selanjutnya dimensi tersebut diukur dengan beberapa indicator. Dimensi kesehatan diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH). Dimensi pengetahuan atau pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sementara itu, standar hidup layak diukur melalui pengeluaran per kapita.

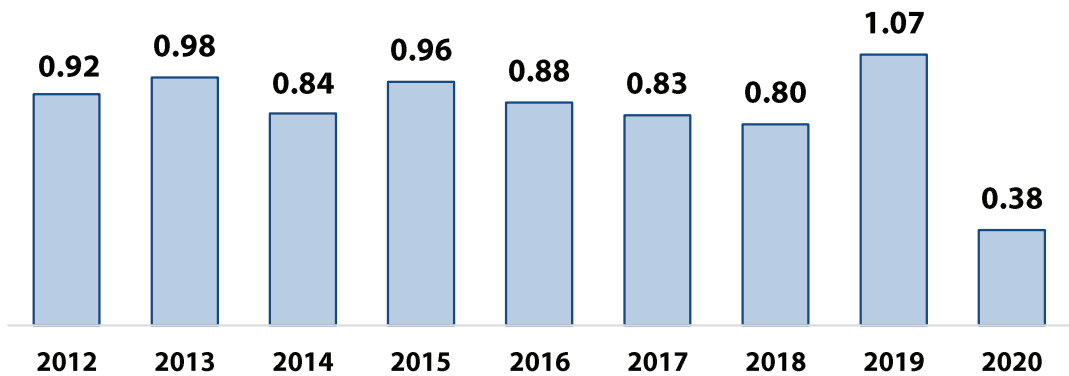
Gambar 4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan, 2010-2020



Badan Pusat Statistik melakukan pengukuran IPM dengan menggunakan data yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Proyeksi Penduduk hasil Sensus Penduduk (SP2010).

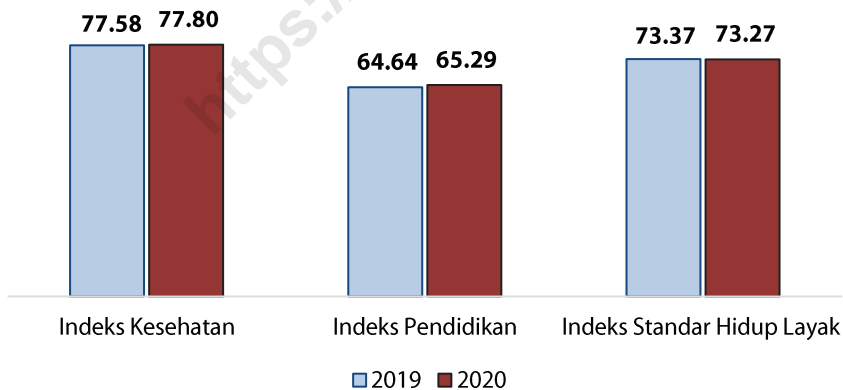
Pada tahun 2020, angka IPM Sulawesi Selatan sebesar 71,93. IPM Sulawesi Selatan tumbuh 0,38 persen atau bertambah 0,27 poin dibandingkan IPM tahun 2019. Pertumbuhan tersebut cenderung lebih lambat dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 1,07 persen.

Gambar 4.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan, 2010-2020



Pertumbuhan IPM pada tahun 2020 didorong oleh peningkatan beberapa indeks komponen pembentuknya. Indeks pendidikan merupakan komponen IPM yang mengalami akselerasi paling tinggi. Pada tahun 2020 indeks pendidikan mencapai 65,29 atau meningkat 0,65 poin dari tahun sebelumnya. Peningkatan indeks pendidikan utamanya disebabkan oleh capaian indeks rata-rata lama sekolah yang meningkat sebesar 1,45 persen atau 0,80 poin. Hal ini menggambarkan semakin tingginya penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal hingga kelas VIII (SMP kelas II).

Gambar 4.3 Komponen IPM Sulawesi Selatan Menurut Dimensi, 2019-2020



Indeks Kesehatan yang diwakili oleh umur harapan hidup mengalami peningkatan yang tidak terlalu besar yakni hanya sebesar 0,28 persen. Sementara itu, indeks standar hidup layak pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,15 persen atau menurun 0,11 poin.

Tabel 4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2019-2020

Kabupaten/Kota	2019	2020	Rank IPM 2020	Laju IPM 2019-2020 (%)	Rank Laju IPM 2019-2020
Selayar	66,91	67,38	21	0,70	4
Bulukumba	68,28	68,99	15	1,04	1
Bantaeng	68,30	68,73	17	0,63	7
Jeneponto	64,00	64,26	24	0,41	14
Takalar	66,94	67,31	22	0,55	12
Gowa	69,66	70,14	10	0,69	5
Sinjai	67,05	67,60	20	0,82	2
Maros	69,50	69,86	11	0,52	13
Pangkep	68,29	68,72	18	0,63	6
Barru	70,60	71,00	8	0,57	11
Bone	65,67	66,06	23	0,59	9
Soppeng	68,26	68,67	19	0,60	8
Wajo	69,05	69,15	14	0,14	20
Sidrap	71,05	71,21	7	0,23	16
Pinrang	71,12	71,26	6	0,20	17
Enrekang	72,66	72,76	5	0,14	22
Luwu	70,39	70,51	9	0,17	18
Tana Toraja	68,25	68,75	16	0,73	3
Luwu Utara	69,46	69,57	12	0,16	19
Luwu Timur	72,80	73,22	4	0,58	10
Toraja Utara	69,23	69,33	13	0,14	21
Makassar	82,25	82,25	1	0,00	24
Parepare	77,62	77,86	3	0,31	15
Palopo	77,98	78,06	2	0,10	23
Sulawesi Selatan	71,66	71,93	-	0,38	-

Pada periode 2019-2020, tercatat tiga Kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Bulukumba (1,04 persen), Kabupaten Sinjai (0,82 persen) dan Kabupaten Tana Toraja (0,73 persen). Sebaliknya, pada periode yang sama, tercatat tiga Kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling lambat yaitu Kota Makassar (0,00 persen), Kota Palopo (0,10 persen) dan Kabupaten Enrekang (0,14 persen).

Berdasarkan status pencapaiannya, pada tahun 2020 hanya Kota Makassar menjadi satu-satunya Kabupaten/kota yang berstatus “sangat tinggi”, 9 Kabupaten/kota telah berstatus pembangunan manusia “tinggi”, yaitu Kota Palopo, Kota Parepare, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Barru, Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Gowa. Sementara 14 Kabupaten/kota lainnya masih berstatus “sedang”. Pada tahun 2020, ada 1 Kabupaten yang mengalami perubahan status dari “sedang” menjadi “tinggi” yaitu Kabupaten Gowa. Level pembangunan manusia yang relatif merata ini mengindikasikan bahwa disparitas pembangunan manusia antar Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan relatif rendah.

Jika melihat indikator pembentuk IPM di Kabupaten/kota, untuk variabel umur harapan hidup pada tahun 2020, Kabupaten Toraja Utara memiliki UHH tertinggi sebesar 73,39 tahun diikuti oleh Kabupaten Tana Toraja dan Kota Makassar sebesar 73,30 tahun dan

72,09 tahun. Sedangkan Kabupaten/kota yang memiliki UHH terendah adalah Kabupaten Jeneponto (66,39 tahun), Kabupaten Pangkep (66,66 tahun) dan Kabupaten Bone (67,07 tahun).

Selanjutnya untuk indikator pendidikan yang terdiri dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kabupaten/kota yang memiliki angka harapan lama sekolah tertinggi adalah Kota Makassar (15,57 tahun) diikuti Kota Palopo (15,07 tahun) dan Kota Parepare (14,50 tahun). Sebaliknya, Kabupaten Jeneponto (11,98 tahun), Kabupaten Bantaeng (12,04 tahun) dan Kabupaten Takalar (12,41 tahun) merupakan Kabupaten/kota dengan harapan lama sekolah terkecil. Seperti halnya harapan lama sekolah, Kota Makassar, Palopo dan Parepare juga menempati posisi tiga teratas untuk Kabupaten/kota yang memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi.

Standar hidup layak yang digambarkan oleh pengeluaran perkapita disesuaikan menunjukkan bahwa Kota Makassar, Parepare dan Palopo juga menempati urutan teratas untuk indikator ini, sedangkan yang berada pada tiga terendah adalah Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Bone.

Tabel 4.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota, 2019-2020

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Selayar	68,34	68,46	12,48	12,65	7,63	7,88	9.028	8.970
Bulukumba	67,69	67,92	12,91	13,17	7,43	7,67	10.480	10.513
Bantaeng	70,42	70,54	12,03	12,04	6,48	6,72	11.592	11.632
Jeneponto	66,24	66,39	11,97	11,98	6,48	6,59	9.078	9.114
Takalar	67,01	67,18	12,25	12,41	7,18	7,29	10.474	10.454
Gowa	70,37	70,43	13,48	13,64	7,97	8,19	9.369	9.394
Sinjai	67,17	67,30	12,87	13,05	7,48	7,75	9.465	9.439
Maros	68,98	69,02	13,02	13,04	7,46	7,73	10.981	10.963
Pangkep	66,49	66,66	12,51	12,76	7,60	7,66	11.392	11.405
Barru	68,91	69,02	13,57	13,58	7,96	8,23	10.911	10.923
Bone	66,88	67,07	12,80	12,88	6,98	7,15	8.954	8.963
Soppeng	69,43	69,65	12,73	12,90	7,74	7,81	9.444	9.483
Wajo	67,17	67,35	13,13	13,14	6,80	6,81	12.399	12.386
Sidrap	69,59	69,83	12,93	12,94	7,83	7,84	12.039	12.073
Pinrang	69,39	69,61	13,22	13,23	7,85	7,86	11.828	11.844
Enrekang	70,83	70,91	13,69	13,70	8,89	8,90	10.800	10.844
Luwu	70,19	70,34	13,32	13,33	8,15	8,24	10.085	10.014
Tana Toraja	73,15	73,30	13,58	13,80	8,02	8,26	7.253	7.217
Luwu Utara	68,31	68,51	12,42	12,43	7,78	7,79	11.583	11.562
Luwu Timur	70,38	70,53	12,82	12,83	8,54	8,80	12.802	12.814
Toraja Utara	73,35	73,39	13,37	13,38	7,92	7,96	8.083	8.097
Makassar	72,00	72,09	15,56	15,57	11,20	11,21	16.989	16.873
Parepare	71,18	71,27	14,49	14,50	10,30	10,45	13.648	13.663
Palopo	70,79	70,88	15,07	15,08	10,75	10,76	12.986	12.995
Sulawesi Selatan	70,43	70,57	13,36	13,45	8,26	8,38	11.118	11.079

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://sulsel.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
Jl. H. Bau No. 6, Makassar, 90125
Telp.: (0411) 854838, Fax: (0411) 85125
Homepage: <http://sulsel.bps.go.id>
E-mail: bps7300@bps.go.id

ISBN 978-623-6203-20-0

